

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, mencakup ruang lingkup yang luas, yang di dalamnya terdiri dari lingkup pembangunan daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan sasaran :

1. Terwujudnya target yang bersifat kedaerahan dalam rangka pencapaian target nasional, mengusahakan pemerataan yang semakin meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tetap terpeliharanya stabilitas di setiap daerah.
2. Terwujudnya tingkat pelayanan umum yang memadai sebagai usaha menaikkan mutu kehidupan masyarakat yang lebih layak di daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Berdasarkan sasaran tersebut, pembangunan daerah dapat menjadi suatu jembatan dalam realisasi pembangunan nasional. Persoalan ketimpangan antar daerah misalnya, merupakan salah satu pokok permasalahan dari berbagai persoalan besar lainnya yang hingga kini masih terus-menerus diagendakan. Tidak kurang mulai dari sekedar tuntutan peningkatan porsi keuangan daerah hingga

gerakan pembangkangan yang mengarah pada ancaman pemisahan dari wilayah kesatuan Indonesia akhir-akhir ini semakin gencar dilakukan berbagai kalangan.

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai latar belakang perbedaan antar daerah, dimana perbedaan antar daerah tersebut merupakan konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, termasuk sumber daya yang ada di dalamnya. Kemudian keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, serta sebaran pertumbuhan pusat-pusat perdagangan dan industri yang merupakan kantong-kantong pertumbuhan yang hanya terkonsentrasi di beberapa daerah saja menyebabkan timbulnya perbedaan pertumbuhan antar daerah, sehingga ketimpangan output antar daerah menjadi lebih tinggi. Dengan adanya ketimpangan output daerah yang tinggi, tingkat ketimpangan pendapatan per orang antar daerah menjadi relatif terlihat.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik dari daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah.

Namun dilain pihak, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup

menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pembangunan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktifitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah ditetapkan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan daerah secara proporsional, adil, demokratis, dan transparan. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No.33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- d. Dana Bagi Hasil (DBH)
- e. Pinjaman Daerah, dll

Dalam UU No. 33/2004 memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.

Setelah dilaksanakannya desentralisasi fiskal, kondisi laju perekonomian antar daerah sangat bervariasi dan hal ini belum seperti yang diharapkan. Disinyalir masih terjadi ketimpangan pada beberapa Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah apabila dibagi menurut wilayah karesidenan terdiri dari enam karesidenan, yaitu Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedu, Karesidenan Surakarta, Karesidenan Pati, Karesidenan Semarang, dan Karesidenan Pekalongan.

Dengan melihat gambaran kondisi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat diketahui bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan masih ada kesenjangan antar daerah. Meskipun daerah diberikan sumber pendanaan yang lebih besar dan kekuasaan yang luas untuk mengelola sesuai dengan keinginan atau kebutuhan.

Data laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah di Eks Karesidenan Kedu (%), tahun 2011 – 2015 :

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
Purworejo	5,64	4,59	4,94	4,48	5,37
Temanggung	6,09	4,27	5,20	5,03	5,21
Wonosobo	5,37	4,70	4,00	4,78	4,85
Kebumen	6,15	4,88	4,57	5,79	6,28
Kab. Magelang	6,68	4,88	5,91	5,38	5,03
Kota Magelang	6,11	5,37	6,04	4,98	5,11

Sumber : *Badan Pusat Statistik (BPS)*, Jawa Tengah.

Kabupaten Kebumen termasuk dalam daerah/Kabupaten yang berada di Eks Karesidenan Kedu, bersama dengan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang. Kabupaten Kebumen sendiri merupakan salah satu daerah yang juga terkena dampak dari desentralisasi fiskal tersebut. Namun, dilihat dari segi laju pertumbuhan PDRB diatas, Kabupaten Kebumen tidak pernah memperoleh angka yang terendah, bahkan bahkan untuk dua tahun terakhir (2014 dan 2015) laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kebumen menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten/Kota yang lain. Hal ini menjadi unik mengingat tidak adanya sektor yang benar-benar menjadi andalan untuk pengembangan ekonomi di Kabupaten Kebumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten / Kota di wilayah Kabupaten Kebumen, serta untuk mengestimasi pengaruh Tenaga Kerja (Angkatan Kerja) terhadap Pertumbuhan Ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji masalah ini secara ilmiah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2001-2015.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen ?
3. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja (Angkatan Kerja) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen ?
4. Bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen.

2. Mengetahui bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Tenaga Kerja (Angkatan Kerja) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi/PDRB di Kabupaten Kebumen.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, dan juga sebagai sarana menambah pengetahuan serta pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Manfaat lain adalah agar penulis dapat membandingkan antara teori dengan praktek di lapangan.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran ataupun sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan pada periode selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang masing – masing dijelaskan secara singkat.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

1. Kajian Pustaka

Bagian tersebut berisi tentang pendokumentasian dan pengkajian hasil – hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

2. Landasan Teori

Berisi tentang teori – teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendekati permasalahan yang sedang diteliti. Landasan teori tersebut digunakan untuk memberikan diskusi yang lengkap tentang hubungan antar variabel yang terkait.

3. Hipotesis

Berisi tentang jawaban sementara mengenai rumusan masalah yang disesuaikan dengan penelitian terdahulu dan teori yang ada, sehingga hipotesis yang disusun merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Secara keseluruhan bab kajian pustaka dan landasan teori ini membahas secara terperinci mengenai kajian pustaka, uraian landasan teori, dari variabel – variabel yang digunakan , teori – teori yang relevan sehingga dapat mendukung penelitian, serta hipotesis yang digunakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang beberapa hal yaitu jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV HASIL, ANALISIS DATA, DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi data, pengujian hipotesis yang telah dibuat, pembahasan, hasil penelitian serta penjelasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pelaksanaan penelitian, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya.